

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ash-Shofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan keempat, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hutagalung, Arie S 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, cetakan pertama, Lembaga pemberdayaan hukum Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan pertama, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. J 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murad, Rusmadi, 2013, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, Cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan, AP, 1994, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Cetakan kedua, Madar Maju, Bandung.
- , 2011, *Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan*, Mandar Maju , Bandung.
- Perangin, Effendi, 1987, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Rubaie, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Bayumedia, Malang.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, cetakan pertama, Setara Press, Malang.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, cetakan pertama, P.T Fajar intepratama Mandiri, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, UI Press, Jakarta.

-----,1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, cetakan pertama, IND-HILL-CO, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Wibawanti, Erna Sri dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta

Widya, Jarot, 2016, *Cara mudah pahami pengadaan tanah untuk pembangunan*, Litera Yogyakarta, Yogyakarta.

B. Tesis-Skripsi

Aprilliando, Pito, “penyelesaian sengketa lahan fasilitas umum antara developer dengan warga perumahan waru surya indah Sukoharjo”, *Skripsi*, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMS, 2016.

Paramita, Edwidya 2012, “eksekusi fasilitas umum yang dibangun di atas tanah sengketa (studi kasus sengketa tanah antar warga Balikpapan melawan pemerintah kota Balikpapan, badan pertanahan nasional, dan perusahaan listrik Negara (kasus taman Bekapai))”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Di Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan pengembang di Kota Depok. Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 14.

Peraturan Daerah kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan. Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 2.

D. Internet

Andy, “Yang Anda Perlu Tahu Tentang Legalitas Perumahan”,
<http://www.andyku.wordpress.com>, diakses tanggal 13
September 2017.

Badan Standart Nasional, “Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di
perkotaan”, <http://distarm.jambikota.go.id>, diakses tanggal 06
September 2018.

BKPM, “Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999”,
https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/BPN_9_1999.pdf, diakses tanggal 16 November 2018.

Dewi Mardiani, “Depok Perketat Perumahan Baru”,
<http://republika.co.id>, diakses tanggal 17 Agustus 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Narasumber”,
<https://www.kbbi.web.id/narasumber>, diakses tanggal 26
Oktober 2018.

Kementrian Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri”,
<http://www.kemendagri.go.id>, diakses tanggal 27 Juli 2017.

-----, “Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun
2016”, <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id>, diakses tanggal
8 Maret 2017.